

PAPER NAME

**Disrupsi Pemerintahan 2 154-157-16-20.  
pdf**

AUTHOR

**Arizka**

WORD COUNT

**1066 Words**

CHARACTER COUNT

**7076 Characters**

PAGE COUNT

**5 Pages**

FILE SIZE

**211.9KB**

SUBMISSION DATE

**Apr 5, 2023 3:02 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Apr 5, 2023 3:02 PM GMT+7****● 2% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 2% Internet database
- Crossref database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

**● Excluded from Similarity Report**

- Submitted Works database
- Quoted material
- Manually excluded sources
- Bibliographic material
- Cited material

# Reformasi Elektoral dan Evaluasi Pemilu Lampung

ARIZKA WARGANAGERA / Media Lampost.co / 2019

---

Boris Johnson Perdana Menteri Petahana Inggris menang besar dan Inggris dengan segera akan keluar dari Uni Eropa, begitulah salah satu judul *headline* sebuah media massa internasional. Boris Johnson sosok kontroversial dalam spektrum politik Britania Raya, sebagai seorang yang berlatar belakang keluarga kelas menengah, mantan Walikota London ini begitu terasa kontroversial sebab Boris-lah salah satu tokoh yang mendorong Inggris keluar dari Uni Eropa.

Nun jauh di seberang atlantik sana saudara muda Amerika Serikat pun mengalami gonjang-ganjing politik yang luar biasa, tokoh kontroversial lainnya Donald Trump mendapat *impeachment* (mosi tidak percaya) dari Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Pada bagian lain Spanyol, Chili, India terutama paska keluarnya undang-undang mengenai Kewarganegaraan (*citizenship bill*) juga mengalami hal yang sama *riot* dan instabilitas politik termasuk juga persoalan warga Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok juga mengalami kondisi yang sama penuh dengan dinamika dan kontroversi.

Dunia politik tidak pernah lepas dari kontroversi, perdebatan dan perebutan kuasa. Dan dunia hari ini memang sedang berhadapan atas ketidakpastian politik dan tentunya juga

2  
turbulensi resesi ekonomi global yang akan segera kita hadapi pada tahun 2020.

Pertanyaannya apakah kita semua sudah siap dengan ini semua perubahan global ini? Dalam konteks nasional, termasuk ketidak-pastian posisi negara soal keberlangsungan Pilkada secara langsung (Pilkadasung). Pada awalnya kita sangat mendukung Pilkadasung. Jikalau kita evaluasi Pilkadasung bagus diawal saja antara kurun waktu tahun 2005 dan 2010, setelahnya politik menjadi sangat *high cost* dengan prevalensi politik uang yang sangat tinggi hampir disemua wilayah Indonesia.

Desk *evaluation* kami misalkan mendorong sebuah reformasi elektoral segera diwujudkan. Pada saat ini, yang menjadi *concern* kita bersama adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat melalui sistem demokrasi yang sehat.

Oleh sebab itu jika sistem Pemilihan Umum kita anut dan pakai baik itu di level Pileg, Pilkada dan Pilpres tidak berdampak pada gejala membaiknya kesejahteraan rakyat atau justru sebaliknya ada semacam kekacauan "messy" ekonomi dan politik ditengah masyarakat. Sistem demokrasi yang dianut mestilah menjadi bagian yang di evaluasi.

Kita misalkan dapat mengusulkan kombinasi sistem pemilu. Kepala daerah kabupaten dan kota dapat saja dipilih kembali melalui DPRD dan Gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden. Pemilihan anggota legislatif DPR RI dan DPRD tetap dipilih secara langsung akan tetapi sistem pemilihan kembali pada sistem proporsional tertutup, rakyat cukup memilih partai saja bukan nama caleg sehingga mekanisme internal partai bisa berjalan dan lompat pagar elit dari satu partai ke partai lain bisa dikurangi.

Satu simulasi kami lakukan dalam kelas mata kuliah Analisis Politik Indonesia, dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, apakah ide anda menyoal reformasi elektoral di Indonesia? jawaban para mahasiswa pun beragam walau pada umumnya mereka tetap mendukung Pilkadasung akan tetapi pada

bagian lain tidak menutup opsi untuk Pilkada via DPRD dengan pengawasan ketat.

Reformasi politik yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun serta sistem Pilkada yang hampir 15 tahun ini dalam konteks kekinian seharusnya segera di evaluasi. Usul mengenai mendorong Pilkada *via* DPRD kembali bisa menjadi alternatif. Banyak hal yang harus dievaluasi misalkan dampak Pilkada yang terhadap politik berbasis *high cost* dan secara akademik ini akan berdampak pada berkembangnya *capitalist elite/elit* kapitalis yang akan mengkooptasi logika kesejahteraan rakyat.

Setelah berjalan 15 tahun, harus diakui memang infra dan suprastruktur politik kita belumlah matang dan siap. Dimulai dari rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, sistem komunalisme yang secara derivatif memunculkan nepotisme dan kolusi politik serta budaya politik paternalistik tidaklah 100% cocok dengan model demokrasi yang sangat liberal.

## **Refleksi**

Dan sebelum sebelum *grand design* reformasi elektoral terlaksana, dalam konteks Lampung setelah mengamati perjalanan politik dalam 1 (satu) tahun terakhir terdapat beberapa hal evaluasi Pemilu.

*Pertama*, dalam konteks penyelenggara. Kita mendorong profesionalitas penyelenggara pemilu mesti ditingkatkan terutama pada level badan penyelenggaraan pemilu yang dibuat AD HOC, kita menemukan misalkan masih banyak sekali petugas KPPS yang masih belum paham berbuat apa ketika ditemukan *disputes* pemilu termasuk juga kelelahan dalam mengorganisir Pemilu 2019 lalu. Dalam konteks lain, tiga serangkai, KPU, PPK dan KPPS sebenarnya juga sangat berperan dalam peningkatan partisipasi pemilu dalam setiap *event* pemilihan umum. Angka partisipasi Pemilu 2019 atau *voter turn out* di Provinsi Lampung mencapai angka 80,60% untuk Pilres dan 80,50% untuk DPR.

Dan angka ini meningkat dengan cukup signifikan, terdapat beberapa dugaan faktor yang meningkatkan angka partisipasi politik tersebut antara lain faktor money politics, kontestasi dua pasangan capres Jokowi dan Prabowo serta keberhasilan penyelenggara melakukan sosialisasi pemilu.

Kedua, dalam konteks pemilih. Menjadi *concern* bersama adalah soal prevalensi politik uang dan menjadi pekerjaan rumah yang berat. Mereduksi potensi prevalensi politik uang disaat yang bersamaan pendapatan per kapita warga masih dalam level yang relatif rendah. Kajian mantan Wakil Presiden Boediono tahun 2006 menyatakan bahwa ambang batas GDP per kapita \$6000 akan membuat demokrasi kita berjalan dengan baik perlu untuk dikaji lebih lanjut mengingat prevalensi politik uang semakin meninggi.

Ketiga, dalam konteks peserta. Ini menjadi lebih kompleks, *problem* kegagalan institusionalisasi partai politik menjadikan kompetisi di ranah elite tidak berjalan semestinya. Visi, misi dan platform politik menjadi hal yang dikesampingkan dibandingkan dengan logistik politik. Dan ini membuat sistem politik semakin mengarah pada persaingan elite kapital ketimbang substansi.

Pada akhirnya, demokratisasi adalah sebuah momen proses coba dan salah, evaluasi setiap kegagalan pemilu mesti menjadi *concern* bersama pada tahun pelaksanaan pemilu selanjutnya. Hanya saja apakah kita serius melakukan evaluasi setiap akhir pemilu atau hal tersebut hanya rutinitas saja?

## Biodata Penulis



**ARIZKA WARGANEGARA, Ph.D.** lahir di Metro 20 Juni 1981 mengabdikan sebagai Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, alumnus Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung tahun 2003 dan Master of Arts dalam bidang Ilmu Politik Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2005. Menyelesaikan Doctor of Philosophy dalam bidang Political Geography di University of Leeds, Inggris Raya tahun 2019.

Pada tahun 2002 penulis tercatat sebagai Mahasiswa Berprestasi Utama I Universitas Lampung dan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional. Kolumnis Jakarta Globe dan Media Indonesia ini pernah menjabat sebagai <sup>1</sup> **Direktur Lembaga Kajian Politik, Publik dan Demokrasi KAHMI wilayah Lampung** dan aktif sebagai Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Inggris Raya.

<sup>3</sup> Pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung. Pada tahun 2015, bersama beberapa pelajar Indonesia yang sedang studi di Inggris Raya mendirikan Lingkar Studi Cendekia, United Kingdom (LSC-UK), sebuah lembaga think tank yang bertujuan memberikan kontribusi pemikiran bagi peradaban Indonesia.

Beberapa paper dipresentasikan pada Konferensi ASEASUK SOAS University of London tahun 2016, ASEASUK Seminar di University of York tahun 2018, Sustain Kyoto Conference Jepang tahun 2013 dan beberapa konferensi di Universitas Kebangsaan Malaysia.

## ● 2% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 2% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

---

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>m.rimanews.com</b> Internet	<1%
2	<b>konbanwa-minnasan.blogspot.com</b> Internet	<1%
3	<b>old-prasetya.ub.ac.id</b> Internet	<1%

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Manually excluded sources
- Bibliographic material
- Cited material

---

EXCLUDED SOURCES

**microsite.lampost.co**

Internet

**74%**